

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*

Pratomo Cahyo Kurniawan¹, Khairina Nur Izzaty²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng

Email : pratomocahyokurniawan@stiebankbpdjateng.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of good corporate governance and internal control on fraud prevention. The study was conducted at BPR Gunung Rizki. A common problem in this study is that there are still cases of fraud that can threaten the company's going concern. The sampling technique used is total sampling using all members of the population. The technique of collecting data using a questionnaire distributed to all employees except the hygiene and security department. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that good corporate governance has a positive effect on fraud prevention. The results of the second analysis show that there is a positive influence between internal control and prevention of fraud.

Keywords: good corporate governance, internal control, fraud prevention

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian dilakukan pada BPR Gunung Rizki. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah masih adanya kasus *fraud* yang terjadi yang dapat mengancam *going concern* perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan kecuali bagian kebersihan dan keamanan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil analisis kedua menunjukkan terdapat pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *good corporate governance*, Pengendalian Internal, pencegahan *fraud*

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat di setiap wilayah dapat mendorong meningkatnya pembiayaan usaha, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berperan sebagai lembaga pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMKM (Azriani, dkk. 2008). Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pinggiran kota sampai ke daerah pedesaan dapat terus tumbuh dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPR awalnya dikenal sebagai Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani atau Bank Pasar (Putri, dkk. 2016). Peningkatan jumlah dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan BPR dari masyarakat dan kepada masyarakat menunjukkan bahwa BPR kini sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang terpercaya

Meskipun BPR telah diawasi kegiatannya oleh OJK bukan berarti BPR terbebas dari *fraud*. Menurut data Perbarindo (2016) BPR telah banyak melakukan *fraud*. *Fraud* yang banyak terjadi adalah pemberian kredit fiktif, deposito fiktif, penggelapan angsuran fiktif, rekayasa pemberian kredit, dan penggelapan hasil penjualan AYDA. Menurut Yoga (2016) BPR cenderung memiliki resiko permasalahan yang lebih besar dibandingkan dengan bank umum karena memiliki jumlah yang lebih banyak dari jumlah bank umum. Berdasarkan data LPS, hingga tahun 2017 telah melikuidasi 76 BPR, beberapa diantaranya karena *fraud*. Tuanakotta (2014) mengemukakan *fraud*

merupakan perbuatan dari personil organisasi baik itu dari luar ataupun dari dalam yang merugikan orang lain dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan kelompok maupun pribadi.

Data Perbarindo menunjukkan bahwa sebanyak 81% dilikuidasi karena *fraud*. OJK mengungkapkan bahwa *Fraud* di BPR disebabkan karena pengurus BPR tidak melakukan *Good Corporate Governance* (GCG) secara penuh. Yoga (2016) mengungkapkan bahwa OJK terus mendorong BPR untuk terus menerapkan GCG dengan menuangkan POJK No 4 Tahun 2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR. GCG menurut Bank Indonesia yang tertuang dalam PBI No 8/4/PBI/2006 adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*). Ariani, dkk (2014) mengatakan bahwa kecurangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Kecurangan dapat ditekan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian Jannah (2016) menghasilkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di BPR kota Surabaya. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara GCG terhadap *fraud* di perusahaan BUMN (Setiawan, 2016). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan GCG yang baik akan menjauhkan perusahaan BUMN dari *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang *fraud*, pengendalian internal dan *good corporate governance*. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai esensi *good corporate governance* dan penerapan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena ada faktor tekanan, kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi serta dapat merugikan orang lain (Tuanakotta, 2010). Variabel Pencegahan *Fraud* diukur dengan instrumen pertanyaan yang dikembangkan dari Sudarmo, dkk (2009:38) yang terdiri dari 4 indikator penetapan kebijakan anti *fraud*, prosedur pencegahan baku, organisasi, teknik pengendalian kepekaan. Cressey (1953) dalam teorinya *Fraud Triangle* mengemukakan 3 hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan (1) Tekanan (*Unshareable pressure/incentive*), faktor tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan dapat berasal dari keserakahan, kondisi ekonomi, faktor emosional individu seperti cemburu, gengsi dan balas dendam, (2) Peluang atau kesempatan (*Perceived Opportunity*), merupakan kondisi yang dimanfaatkan seseorang untuk melakukan tindakan curang. Peluang timbul dari keadaan pengendalian internal yang lemah, pengawasan yang kurang dan individu yang melakukan penyalahgunaan wewenang. *Fraud* dari peluang ini dapat diminimalisir dengan melakukan proses pendeteksian dini dan melakukan penerapan kontrol yang baik terhadap kecurangan, (3) Rasionalisasi (*Rationalization*), merupakan kondisi dimana pelaku *fraud* berusaha menunjukkan bahwa apa yang dilakukan benar sebelum melakukan kecurangan. Hal ini dilakukan agar perilaku ilegal yang dilakukannya tetap dipercaya walaupun telah melakukan kecurangan. Pembeneran ditunjukkan pelaku sebelum melakukan kecurangan, dan bukan ditunjukkan sesudah melakukan kecurangan. Rasionalisasi yang biasanya dilakukan dalam bentuk peminjaman aset yang dicuri untuk kepentingan orang lain yang disukainya.

Good Corporate Governance merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pengurus, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, serta dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari, dkk, 2015). GCG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari dkk, 2015). GCG diukur dengan menggunakan instrumen

pertanyaan yang dikembangkan oleh Yudokusumo (2014) yang terdiri dari 5 indikator yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya (Sunyoto, 2014). Menurut Arens (2013:396) pengendalian internal terdiri dari kebijakan serta proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kecurangan dapat berarti sebagai penipuan yang secara sengaja dilakukan untuk mengambil hak, harta dari orang lain. Bentuk – bentuk kecurangan antara lain penyalahgunaan aset, pernyataan palsu, dan korupsi (Eliza, 2015). Pengendalian internal diukur menggunakan instrumen pertanyaan yang dikembangkan, mengacu pada komponen pengendalian internal Arens (2013). Indikator – indikator yang digunakan antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Fraud triangle menjelaskan *fraud* dapat terjadi ketika ada situasi dengan tekanan yang tinggi dan terdapat kesempatan serta didukung dengan individu yang berintegritas rendah. Albrecht (2004) menyatakan bahwa faktor keinginan untuk mencari keuntungan untuk pribadi merupakan motivasi bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Prinsip GCG diperlukan dalam rangka mencegah potensi *fraud* yang terjadi pada perusahaan maupun organisasi sektor publik. Prinsip GCG adalah bentuk kode etik dan prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum (Soleman, 2013). Gusnardi (2011) menemukan bahwa pengendalian internal dan GCG dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini berarti bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan organisasi apabila perusahaan menerapkan GCG. Zeyn (2012) menyatakan bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan dapat memperkecil terjadinya *fraud*. Jannah (2016) menyatakan bahwa penerapan GCG yang sangat baik dapat mencegah terjadinya *fraud*, sehingga hipotesis penelitian adalah :

H₁: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa pengendalian intern yang lemah akan mempengaruhi besarnya kesempatan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan (Giarini, 2015). Hasil penelitian Giarini (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Soleman (2013), menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Arfah (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hipotesis penelitian adalah :

H₂: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan BPR Gunung Rizki (kecuali bagian keamanan dan kebersihan) yang ada pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR Gunung Rizki. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *total sampling* dimana

semua populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil dan Pembahasan

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, maka dapat dilihat dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov Test*.

Tabel 1. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,974
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,430

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorof-Smirnov adalah 0,974 dan nilai signifikansi 0,430 dimana tidak signifikan pada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria jika nilai tolerance mendekati 1 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian tidak terjadi masalah multikolonieritas.

Tabel 2. Uji Multikolonieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
GCG	0,925	1,019
SPI	0,944	1,011

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama dimana tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model penelitian ini

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi liner berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.3 Rangkuman Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig
Konstanta	97,652	14,764	0,000
GCG	8,671	9,398	0,002
SPI	5,172	9,311	0,001
R ²	: 0,307		
Fhit	: 9,876		
Fsig.	: 0,000		

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel GCG dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Dari hasil uji F di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 9,876 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini layak digunakan memprediksi Pencegahan *Fraud*.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen moralitas individu memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 8,671 yang berarti bahwa pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* adalah positif. Nilai signifikansi sebesar 0,002 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05, dengan demikian Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* adalah diterima. Hasil penelitian ini berarti bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud*. Penerapan transparansi, manajemen yang memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran yang baik akan meminimalisir terjadinya *fraud*. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013), Anugerah (2014), Jannah (2016), yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen moralitas manajemen mempunyai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 5,172, berarti bahwa pengaruh moralitas manajemen terhadap kecurangan akuntansi adalah negatif. Nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05, dengan demikian hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa Pengendalian *Internal* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* adalah diterima. Hasil penelitian ini berarti bahwa penerapan pengendalian Internal yang efektif dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfah (2011), Zainal (2013), Soleman (2013), Giarini (2015), yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat mencegah terjadinya *fraud*, begitupun sebaliknya jika perusahaan tidak menerapkan *Good Corporate Governance*, kemungkinan terjadinya *fraud* akan lebih besar karena manajemen perusahaan tidak berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada instansi dapat mencegah *fraud* secara efektif serta memperkecil dapat peluang individu untuk berbuat curang.

Referensi

- Amrizal, 2004, “Pencegahan dan Pendeteksian kecurangan oleh internal auditor”. www.bpkp.go.id. Diakses pada hari selasa, 26 Februari 2018.
- Arens A. Alvin. Ellder J. Ronald & Beasley Mark S. (2013). “Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi”. Jakarta: Erlangga.
- Ariani, Musmini, dan Herawati. 2014. “Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di PDAM Kab Bangli”. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2.
- Azriani, Zednita, Harianto, dan Nuryantono, Nunung. 2008. “Peranan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat”. *Forum Pascasarjana*, 31, pp.173–188.
- Cressey, D. 1953. *Other People’s Money: a Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Eliza, Yulina. 2015. “Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kota Padang”. *STIE Perdagangan Padang. Jurnal akuntansi volume 4 no 1, halaman :86-100*.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi SPSS. Cetakan V. Semarang”: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriastuti, M., & Ifada, L. M. 2011. “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud”. *Ekobis. Vol.12, No.2, April 2011, 12(2), 168–176*.
- Jannah, Sitti Fitratul. 2016. “ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat Kota Surabaya”. *Jurnal Akuntansi, 177-191*.
- Mulyadi. 2009. “Auditing Edisi 6 Buku 1”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Perbarindo. 2016. “Permasalahan dan Tantangan BPR/BPRS”. www.perbarindo.or.id. Diakses pada hari selasa, 26 Februari 2018.
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2018. “Daftar BPR yang Dilikuidasi”. www.lps.go.id. Diakses pada hari selasa, 26 Februari 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan . 2017. “Statistik Perbankan Indonesia 2017”. www.ojk.go.id. Diakses pada hari selasa, 26 Februari 2018.
- Putri, I. G. A. M. A. D., Ulupui, I. G. K. A., & Wirawati, N. G. P. 1998. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 12, 17–24*.
- Sari, dkk. 2015. “Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, No.1*.
- Setiawan, Raja Reno. 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Corporate Governance Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Pada Perusahaan BUMN Di Kota Pekanbaru”. *JOM Fekon, 3(1), 1–15*.
- Soleman, Rusman. 2013. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud”. *JAAI. Vol. 17 No. 1, 57–74*